

Judul : Komisi X, soal rekonstruksi pascabencana, pulihkan juga ekonomi warga
Tanggal : Minggu, 04 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi X Soal Rekonstruksi Pascabencana Pulihkan Juga Ekonomi Warga

FOTO: TED/RI



Hetifah Sjaifudian

KETUA Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyarankan pembangunan infrastruktur pascabencana juga diikuti pemulihan sosial, ekonomi, dan martabat masyarakat yang terdampak bencana. Salah satu caranya dengan melakukan program padat karya.

"Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan," kata Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Melalui skema tersebut, warga terdampak dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Warga juga memperoleh penghasilan dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga mereka di tengah situasi sulit.

"Pendekatan tersebut dapat memperkuat rasa memiliki dan solidaritas sosial dalam membangun kembali wilayahnya," kata Hetifah.

Selain itu, perguruan tinggi bisa berperan strategis sebagai mitra pemulihan pasca bencana dengan memberikan kontribusi nyata. Caranya melalui asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, hingga dukungan pemulihan psikososial.

"Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian

kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan," imbuh politikus Golkar ini.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lanjutnya, juga memegang peran krusial untuk memastikan proses pemulihan berbasis riset, data, dan inovasi. BRIN dapat mendukung pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, dan model pembangunan adaptif yang sesuai dengan karakteristik wilayah terdampak.

Dia bilang, hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat setempat. Dengan sinergi antara Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pasca bencana tidak lagi bersifat reaktif. "Ini momentum membangun ketangguhan jangka panjang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)," tegasnya.

Anggota III DPR Muslim Ayub menambahkan, penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan kerja. Ini menjadi tanggung jawab kemanusiaan yang harus diutamakan dalam situasi bencana.

Dalam situasi darurat, kata Muslim, tidak ada waktu untuk menunda. Semua keputusan di lapangan harus menuntut kerja cepat dan tepat. Termasuk sikap tegas terhadap tim, dilakukan demi memastikan bantuan kemanusiaan segera sampai kepada masyarakat. "Kepentingan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, di atas segala hal," ucapnya.

Muslim memuji tim dari TNI dan Polri yang bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan dan memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Keterlibatan aparat negara itu memberikan energi positif dan memperkuat kerja lapangan yang dilakukan secara terpadu. ■ TIF